



DAFTAR ISI :

Peraturan dan
Perundang-undangan
Berita Nasional dan
Internasional
Berita Kadin
Seminar dan Pameran
GAPMMI & Anggota

PENERBIT :

GAPMMI

(Gabungan Pengusaha
Makanan dan Minuman
Seluruh Indonesia)

SEKRETARIAT:

Kantor :
Kantor Pusat
Departemen Pertanian RI
Gedung F Lantai II R. 224A
Jl. Harsono RM no. 3 - Ragunan
Jakarta Selatan 12550
Telp. : 021- 70322626-27
Fax.: 7804347

E-mail :
gapmmi@cbn.net.id
gapmmi@yahoo.com

Web. :
www.gapmmi.or.id

Kenaikan harga minyak bumi dunia dan adanya perubahan cuaca dunia, menyebabkan turunnya Produksi Hasil Pertanian & Peternakan. Usaha-usaha untuk menggunakan hasil pertanian untuk biofuel menyebabkan harga-harga komoditas pertanian dan peternakan meningkat drastis. Harga gandum, jagung, kedelai, susu bubuk, biji-bijian meningkat sangat tinggi juga harga CPO yang diproduksi dalam negeri. Salah satu korban kenaikan harga minyak sawit (CPO) adalah industri pengolahan makanan dan minuman karena mereka juga menggunakan CPO sebagai bahan baku. Seperti susu kental manis menggunakan sedikitnya 8 % CPO dari seluruh produknya. Kenaikan harga jual produk makanan dan minuman tidak perlu terjadi jika pasokan CPO memadai sehingga mencukupi kebutuhan industri pengolahan makanan dalam negeri. Kalangan produsen pengolahan makanan dan minuman sangat mendukung kebijakan pemerintah yang akan menerapkan kenaikan pajak ekspor (PE) terhadap CPO dan produk turunannya dari 1,5 % menjadi 6,5 %.

Presiden telah menandatangani paket peraturan pelaksana Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Peraturan tersebut adalah Peraturan Presiden tentang Daftar Negatif Investasi (Perpres DNI) yang terdiri dari dua perpres. Pertama, Perpres Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Kedua, Perpres Nomor 77 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pemerintah menyatakan lahirnya peraturan tersebut memberikan transparansi bagi investor, terutama pemodal asing. Namun pemerintah juga mengingatkan ketentuan ini tidak berlaku surut. Artinya, investasi yang tertera dalam DNI ini namun telah terjadi ataupun yang baru berproses tetap boleh berlanjut. Kalangan pengusaha dalam Kadin menilai Perpres tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) masih sarat dengan 'area abu-abu' yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian di dunia usaha dan masih di luar harapan dunia usaha.

PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN

UU RI No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025. Ditetapkan dan berlaku sejak 5 Februari 2007.

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan, misi dan arahan Pembangunan Nasional.

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditetapkan dan berlaku sejak 26 April 2007.

Undang-Undang ini terdiri dari 40 pasal terdiri dari kebijakan dasar PM; bentuk badan usaha & kedudukan; perlakuan terhadap PM; ketenagakerjaan; bidang usaha; pengembangan PM bagi UMKM dan Koperasi; hak, kewajiban dan tanggung jawab PM; fasilitas PM; pengesahan & perizinan perusahaan; koordinasi & pelaksanaan kebijakan PM; penyelenggaraan urusan PM; kawasan ekonomi khusus; penyelesaian sengketa; dan sanksi.

PP No. 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi. Ditetapkan dan berlaku sejak 22 Juni 2007.

Kemampuan tersebut merupakan faktor yang sangat menentukan dalam peningkatan kinerja produksi dan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan. Pemerintah dapat memberikan insentif berupa insentif perpajakan, kepabeanan, dan bantuan teknis penelitian dan pengembangan. Badan usaha dapat mengajukan permohonan insentif secara tertulis kepada Menegristek karena dalam PP ini Menegristek mendapat kewenangan memberikan rekomendasi insentif bagi badan usaha, sedangkan insentif perpajakan dan kepabeanan dapat diberikan sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan perpajakan dan kepabeanan yang ada

Perpres Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Ditetapkan dan berlaku sejak 3 Juli 2007.

Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal baik asing maupun dalam negeri ditetapkan dengan berdasarkan kriteria kesehatan, keselamatan, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup dan moral budaya (K3LM) dan kepentingan nasional lainnya. Kriteria penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah : perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan UMKMK, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, dan kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Perpres No. 77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Ditetapkan dan berlaku sejak 3 Juli 2007.

Ada 25 bidang usaha yang dinyatakan tertutup, 43 yang dicadangkan untuk UMKMK, ada 36 yang diwajibkan untuk dijalankan melalui prinsip kemitraan, ada sekitar 120 yang kepemilikan asingnya dibatasi, ada 19 yang dibatasi operasinya di lokasi tertentu saja, ada 25 yang membutuhkan perizinan khusus, ada 48 yang harus 100% dimiliki domestik, ada 17 yang terkena pembatasan kepemilikan asing plus izin lokasi, ada 4 yang terkena pembatasan kepemilikan asing plus izin khusus, dan hanya satu yang harus dimiliki 100% domestik plus izin khusus.

BERITA NASIONAL & INTERNATIONAL

Deklarasi dan Penandatanganan Deklarasi Dewan Teh Indonesia. Bandung, 19 April 2007.

Dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 587/Kpts/OT.180/9/2006 tanggal 27 September 2006 telah dibentuk Komisi Teh Indonesia dan setelah melalui serangkaian rapat komisi maka dibentuk Dewan The Indonesia dan dilakukan Deklarasi serta penandatanganan pada 19 April 2007 di Hotel Savoy Homann Bandung. Ketua Umum GAPMMI Ir. Thomas Darmawan menjadi salah satu deklarator.

Deklarasi Dewan Rempah, Lokakarya Rempah Nasional serta Peringatan Hari Krida Pertanian. Deptan, 21 Juni 2007.

Dewan Rempah Indonesia (DRI) di deklarasikan dan ditandatangani oleh 21 deklarator disaksikan oleh Menteri Pertanian. Acara dilanjutkan dengan sidang pleno dewan pendiri untuk pengesahan AD/ART dan pembentukan Formatur untuk pemilihan Dewan Rempah. Acara diakhiri dengan pengumuman susunan pengurus DRI sekaligus pelantikannya.

Diskusi Peternakan " Pemanfaatan Pakan Alternatif Dalam Upaya Peningkatan Produksi Ternak. ISPI, 25 April 2007.

Peningkatan produksi usaha ternak dipengaruhi sekitar 70 % kondisi eksternal (lingkungan) dan 30 % kondisi internal (kualitas mutu genetik ternak). Dari 70 % kondisi eksternal yang paling dominan adalah pakan dimana sebagian besar biaya produksipun berada pada alokasi penggunaan pakan ternak. Di Indonesia, sebagian besar bahan baku pakan masih mengandalkan impor (jagung, bungkil kedelai, tepung ikan, feed aditif). Masalah ketersediaan, kualitas dan kuantitas serta harga bahan baku pakan akan sangat menentukan efisiensi usaha serta produktivitas usaha ternak. Dalam persaingan bebas sekarang ini, inovasi teknologi dan keahlian merupakan jawaban terhadap kemampuan meningkatkan produksi hasil ternak yang berdaya saing. Sentuhan Inovasi khususnya Bio Teknologi di bidang pakan sangat diperlukan guna mengatasi berbagai problema ketersediaan pakan yang selama ini menjadi masalah di subsector peternakan.

Rakertas Pengembangan Potensi Sumber Daya Pangan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan. Wantanas, Lombok - NTB, 24 - 26 April 2007.

Ketergantungan masyarakat terhadap satu bahan makanan pokok (beras), menuntut jaminan ketersediaan yang berkesinambungan. Namun ketersediaan tersebut mengalami kendala karena tidak semua lahan cocok untuk tanaman padi dan memerlukan upaya distribusi yang lebih rumit apabila ketersediaan beras harus dipenuhi daerah lain. Kondisi ini rentan terhadap krisis makanan pokok dan dapat berakibat pada lemahnya ketahanan pangan nasional dan identik dengan lemahnya ketahanan nasional. Keanekaragaman pangan harus dikembangkan untuk mencegahnya. Keanekaragaman pangan berbasis kearifan lokal di daerah harus dikelola secara optimal sebagai bagian dari sistem ketahanan pangan meliputi subsistem produksi, distribusi, dan konsumsi agar mewujudkan availability, accessibility, sustainability, dan independability pangan nasional.

Musrenbangnas BAPENAS Tahun 2007 dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008. Hotel Bina Karna, 3 - 6 Mei 2007.

Tema Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2007 "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran", dijabarkan kedalam 8 prioritas. Prioritas pembangunan ditetapkan atas dasar pertimbangan bahwa program dan kegiatan pokok yang disusun oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah bersifat realitas, penting dan mendesak untuk dilaksanakan, serta memiliki dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan masyarakat. Prioritas pembangunan tersebut merupakan rencana aksi bagi pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJM Nasional 2004 - 2009.

Tumbuh Bersama MAKRO. 16 Mei 2007.

Makro Indonesia sebagai pusat perkulakan yang telah memasuki babak baru dalam perannya mamajukan jaringan distribusi di Indonesia. Saat ini Makro Indonesia siap melayani pedagang eceran kecil & menengah, hotel, catering, restoran, kantor, rumah sakit, dan sekolah. Makro menyediakan solusi informasi dan analisa pasar menyediakan layanan Key Account Data Makro dan Planogram Clearing House.

Seminar Retail Management. APRINDO, 22 Mei 2007.

Seminar dengan tema Pengembangan Program Pendidikan Ritel dan Implementasi E-Market dalam Strategi Bisnis Ritel. Tema ini diangkat mengingat pesatnya perkembangan Ritel Modern (minimarket, supermarket, hypermarket, dan speciality store) di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan Ritel modern juga diiringi dengan perkembangan teknologi informasi (ICT : Information Communication Technology) untuk meningkatkan pelayanan kepada konsume sehingga diharapkan dengan pemanfaatan teknologi secara maksimal dapat memberikan nilai lebih bagi peningkatan usaha Ritel di Tanah Air.

Seminar Menyiasati Peningkatan 2 Juta Ton Beras 2007. AGRINA, 22 Mei 2007.

Dengan kebutuhan 139 kg beras per tahun/kapita dan 224 juta pemakan nasi yang laju pertumbuhannya 1,35 % per tahun menjadikan swasembada sulit tercapai. Presiden mencanangkan tahun 2007 ini, Indonesia akan menambah produksi berasnya dua juta ton yang berarti pertumbuhan produksi harus tumbuh minimal 5 %. Dari pengalaman sejak tahun 2001, angka rata-rata pertumbuhan produksi padi berkisar 1,5 % per tahun. Kenaikan sebesar 5 % memerlukan strategi dan terobosan lebih jitu. Pemerintah akan membantu petani dengan subsidi benih, subsidi pupuk, dukungan penyuluhan, perbaikan jaringan irigasi desa, tata air mikro serta jalan.

Seminar New Concept & Regulation on Food Packaging. Federasi Pengemasan Indonesia, 24 Mei 2007.

Jenis dari bahan yang dikemas didalam Kemasan makanan terutama jenis makanan olahan (Processed Food) dan aneka makanan kering lainnya semakin beragam. Hal ini akan menimbulkan masalah apa bila jenis lapisan yang bersentuhan langsung dengan produk yang dikemas tidak dikembangkan untuk menyesuaikan karakteristik dari bahan-bahan yang dikemas. Dengan banyaknya jumlah dan jenis kemasan yang digunakan untuk pangan, baik produksi dalam negeri maupun impor maka perlu diterapkan sistem pengawasan yang efektif. Perlu suatu ketentuan yang mempunyai kekuatan hukum untuk keamanan konsumen dalam mengkonsumsi produk-produk makanan semakin terjamin dan resiko penggunaan kemasan yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan keamanan serta mutu kemasan pangan.

Rakertas " Kebijakan Strategis Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan Guna Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Rakyat ". Wantanas, Padang, 5 - 7 Juni 2007.

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah bangsa dan negara, bukan terbatas pada Depnakertrans, tetapi masalah hampir diseluruh Kementerian/Lembaga terkait. Tidak terkecuali didalamnya lembaga legislatif karena terkait dengan penyediaan undang-undang, para pelaku industri dan perdagangan karena terkait erat dengan faktor produksi. Kondisi saat ini masih nampak belum adanya keterpaduan upaya lintas Kementerian/Lembaga dan pelibatan secara pro aktif pelaku usaha dalam memecahkan masalah ketenaga kerjaan. Menghadapi kondisi standar nasional, regional dan internasional, pemerintah perlu menentukan kebijakan strategis guna mempercepat pemecahan masalah ketenagakerjaan yang dirasakan semakin kompleks.

Focus Group Discussion. LPEM-UI , 8 Juni 2007 & 21 Juni 2007.

LPEM FEUI bersama Yayasan Indonesia Forum melakukan kajian mengenai "Visi Indonesia 2030". Sektor yang dikaji Jasa Perdagangan Besar dan Eceran. Laporan World Economic Forum (WEF) menjelaskan berdasarkan Global Competitiveness Report (GCR), daya saing iklim perdagangan Indonesia terus menurun dari tahun 2002 hingga tahun 2003 dan sedikit mengalami perbaikan dari tahun 2004 - 2006. Salah satu sebab rendahnya daya saing investasi di Indonesia berkaitan dengan perijinan usaha. Perijinan seringkali dianggap merepotkan dan menimbulkan biaya tambahan yang tidak sedikit, baik dalam hal biaya dan waktu. Acara diskusi tentang Penerimaan Negara juga dilakukan ditempat yang sama membahas masalah Peran Perpajakan dalam Penerimaan Negara. Rasio penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri pemerintah mencapai puncaknya di tahun 2003 yakni 71 % sebelum turun hingga 68,3 % di tahun 2005. Sementara capaian tertinggi tax ratio adalah 12,8% PDB yang terjadi di tahun 2004 dan 2005. Sistem pajak di Indonesia relatif sudah berkembang menjadi sistem pajak yang modern. Perkembangan ini terutama ditandai dengan bergesernya struktur perpajakan dari pajak-pajak seperti cukai, bea impor, dan pajak properti kepada pajak yang bersifat langsung seperti pajak penghasilan badan dan pajak pendapatan individu yang bersifat progresif.

Pembekalan Materi dan alat Bantu Calon Surveyor. 2B Consultant, 14 Juni 2007.

Pembekalan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Survei dan Pengumpulan Data Lapangan " Inventarisasi Kebutuhan Gula Rafinasi pada Industri Makanan Skala Kecil dan Rumah Tangga". Survei akan dilakukan melalui wawancara dan pengumpulan data dari stakeholder terkait industri makanan dan minuman skala kecil dan rumah tangga serta pergulaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yaitu : Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, produsen gula rafinasi, pengimpor gula rafinasi, asosiasi-asosiasi (AGRI dan GAPMMI) dan pelaku distribusi gula rafinasi.

Seminar Impor Kedelai Sepanjang Masa ? Merumuskan Solusi dari Sisi Kebijakan & Teknologi. FPKS DPR RI, 20 Juni 2007.

Tahun 2006, kebutuhan kedelai nasional 2 juta ton, sementara produksi kedelai nasional baru mencapai 800 ribu ton. Pemerintah rata-rata melakukan impor sebesar 1,2 juta ton tiap tahun. Indonesia mengklaim sebagai negara pertanian, namun kenyataannya masih kurang fokus dalam meningkatkan produksi kedelai, padahal kebutuhan kedelai sebagai bahan pangan multi fungsi masih kurang. Seminar ini membahas upaya meningkatkan produksi kedelai untuk memenuhi kebutuhan nasional, baik secara ekstensifikasi menyangkut ketersediaan lahan dan bagaimana menggerakkan masyarakat untuk bertanam kedelai atau secara intensifikasi menyangkut teknologi mulai dari pembibitan (bibit unggul), pengolahan lahan, pemupukan, pencegahan hama dan termasuk pengembangan teknologi pasca panen.

Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Industri Jamu, Obat-Obatan, Kosmetik Dan Makanan. Kemenkoekuin, 19 Juni 2007.

Isu yang diangkat dalam pertemuan ini mengenai : keterbatasan bahan baku; belum adanya standar dalam menghadapi harmonisasi regulasi antar negara ASEAN dengan peraturan internasional tahun 2010; adanya tekanan pihak industri farmasi herbal; maraknya peredaran jamu dengan bahan kimia obat; pengawasan perijinan di daerah; peningkatan impor dan panjangnya rantai birokrasi perijinan/pendaftaran.

Pembahasan Konsep Usulan Cooperation CEFBID, IJ-EPA. Deperin, 21 Juni 2007.

Pertemuan sebagai tindak lanjut hasil perundingan Intersession Meeting Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) khususnya Cooperation "Center of Excellence for Food and Beverages Industry Development" (CEFBID). Menyusun prioritas usulan kebutuhan training dan expert serta menyusun rincian kegiatan untuk enam jenis training dan expert yang telah ditawarkan oleh pihak Jepang.

Coffe Morning Meeting. IPB, 22 Juni 2007.

Globalisasi ekonomi mempercepat laju serta memperkaya perdagangan dunia dengan berbagai jenis barang pangan. Perdagangan global telah memunculkan berbagai macam resiko baru. MoniQa Network of Excellence merupakan jejaring Internasional yang didanai oleh European Commission dengan tujuan umum untuk mengharmonisasi metode analisis pangan untuk monitoring dan pengendalian mutu serta keamanan pangan pada rantai suplai produk pangan. MoniQa Network mengintegrasikan organisasi-organisasi kunci dan institusi-institusi yang menaruh perhatian terhadap mutu dan keamanan pangan di seluruh dunia.

Workshop Penerapan Tarif Bea Masuk Tahun 2007 dan Pencantuman Komoditi Industri Kecil dan Menengah Dalam Perjanjian Perdagangan Internasional. Deperin, 21 - 23 Juni 2007.

Workshop yang dilaksanakan di Hotel Maharani ini bertujuan untuk memahami : (a) Penerapan Tarif Bea Masuk Tahun 2007 yang mengalami perubahan atas Tarif Bea Masuk Tahun 2004 dan (b) Kesiapan IKM dalam menghadapi Perdagangan Internasional.

Peringatan HUT BI Ke 51. BI, 1 Juli 2007.

Peringatan hari jadi Bank Indonesia bersamaan dengan peresmian beberapa produk, yakni Data & Informasi Bisnis Indonesia (DIBI), Tim Fasilitas Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah (TFPPED), Pilot Project Kluster UMKM, Peluncuran Logo Industri Syariah, dan Gerai Info BI untuk kebutuhan para pemangku kepentingan (stakeholders).

Breakfast Meeting bersama Menteri Perindustrian. 6 Juli 2007.

Bagi sektor industri, salah satu instrumen yang selama ini cukup signifikan mendukung tujuan tersebut adalah melalui implementasi berbagai kebijakan fiskal. Breakfast kali ini membahas upaya mempertahankan peningkatan daya saing produk industri melalui dukungan kebijakan fiskal.

Karantina Pertanian, Deptan

Dalam bulan bakti karantina, telah diluncurkan SISPURA & SIKAWAN, sistem informasi on line untuk karantina Pertanian & Hewan. Acara dilaksanakan di Tanjung Priok juga peresmian UPT Karantina di Terminal kedatangan untuk mempercepat proses. Peresmian Instalasi Karantina - Balai Besar Karantina Hewan Soekarno Hatta ditandai dengan penandatanganan Prasasti dan sekaligus peresmian Sistem Informasi Karantina Pertanian. Dalam kesempatan itu juga dilakukan teleconference dengan penggunaan Jasa Karantina Hewan & Karantina Tumbuhan.

Temu Koordinasi Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara. Depdiknas, 10-11 Juli 2007.

Jumlah buta aksara di Indonesia usia 15 tahun ke atas sebanyak 12,8 juta orang (8,07 %). Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) diharapkan dapat mendorong dunia usaha/industri, lembaga/organisasi keagamaan, organisasi perempuan, organisasi pemuda, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi sosial masyarakat lainnya lebih berpartisipasi dalam melaksanakan GNP-PWB-PBA. Depdiknas berharap para pengusaha dari berbagai perusahaan nasional dan BUMN/BUMD berpartisipasi dalam percepatan pemberantasan buta aksara dengan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaannya melalui CSR (Corporate of Social Responsibility).

Workshop Pemandu Lapangan I (PL-I) Sekolah Lapangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. PPHP-Deptan, 9 - 14 Juli 2007.

Workshop yang diselenggarakan di Hotel Ria Diani Puncak-Bogor tersebut guna meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia bagi pembina, pelaku usaha dan petani dibidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di pedesaan. Materi pelatihan antara lain meliputi : kebijakan-kebijakan (pemasaran hasil pertanian, penanganan pasca panen, pengolahan hasil pertanian, dan penerapan jaminan mutu); Pengembangan kelembagaan Kelompok Tani & Gapoktan; perencanaan hasil usaha; permodalan SKIM Kredit; pembukuan usaha dan teknik kependamuan.

Seminar " Meningkatkan Daya Saing Produk Pangan Lokal melalui Ilmu dan Teknologi untuk Menunjang Ketahanan Pangan Nasional". PATPI, Bandung, 17-18 Juli 2007.

Seminar melibatkan anggota PATPI seluruh Indonesia, dosen, peneliti dan pemerhati pangan, mahasiswa, instansi dan lembaga terkait, serta industri pangan. Materi seputar meningkatkan daya saing untuk menunjang ketahanan pangan, penerapan ilmu dan teknologi, dan evaluasi & solusi program UKM, dilanjutkan kunjungan ke pameran UKM se-Jawa Barat.

Seminar " Tinjauan Sosial Ekonomi dan Lingkungan Tanaman Produk Rekayasa Genetika". Deptan, 17 Juli 2007.

Diselenggarakan oleh Indonesia Biotechnology Information Center (IndoBiC). Seminar sebagai upaya pencerahan dan diseminasi informasi yang berharga bagi masyarakat luas. Indonesia sangat membutuhkan terobosan perubahan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan guna ketahanan pangan.

Food and Beverages Industries gathering. JABABEKA, 25 Juli 2007.

Pertemuan membahas peningkatan kemampuan dan daya saing industri makanan dan minuman Indonesia serta sebagai sarana Business Networking. Pertemuan atas kerjasama GAPMMI dengan Industri di Kawasan Jababeka.

Seminar " Quality & Safety Service". Hotel Mulia, 26 Juli 2007.

Keamanan pangan dan kebersihan peralatan akan terus menjadi hal yang penting bagi industri pangan dan peralatannya. Isu keamanan pangan sekarang tidak hanya diterapkan pada mutu produk, tetapi juga dalam proses dan prosedur produksi. Kesadaran tentang keamanan pangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pangsa pasar.

Training of Trainer (TOT) EU Directive. BSN, 24-26 Juli 2007.

Training of Trainer in Understanding and Interpreting EU Directive and Technical Regulations sebagai tindak lanjut Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman dengan European Union (EU) untuk program EU-Indonesia Trade Support Programme Technical Assistance khususnya program WTO capacity building dan Standard Harmonization with EU practices.

BERITA KADIN

Business Meeting dengan Delegasi Pengusaha Taiwan. Kadin, 8 Juni 2007.

Delegasi dari Taiwan beranggotakan 23 orang pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha : magnetic, magnetic phoneindex, magnetic phone, magnetic clips, air river special tools & parts, filter, air pollution control equipment, snap ring, spring pin, washer, battery charger, machines, packing gaskets, medical instrument, air riveter, stainless steel castings, parts, electronics, mug bean, kidney beans, soybean, potato starch, plastic products dan hardware. Mereka ingin menjajaki kerjasama dengan pengusaha di Indonesia.

Malaysia - Indonesia Investment & Finance Summit 2007. Kadin, 18 Juni 2007.

The Labuan Offshore Financial Authority (LOFSA) dibawah koordinasi Ministry of Finance Malaysia melakukan pertemuan dengan para pelaku pengusaha di Indonesia. Delegasi beranggotakan pengusaha terkemuka Malaysia dari top management. Topik utama dalam pertemuan ini adalah menyamakan pemikiran antara Indonesia dan sektor swasta Malaysia dalam mengidentifikasi peluang bisnis dan memperkuat kerjasama kedua belah pihak di bidang investasi dan keuangan seperti halnya pihak pemegang keputusan kedua negara.

Policy Dialogue. Kadin, 25 Juni 2007.

Pertemuan Trade Ministerial Meeting (TMM) ke-7 yang akan diselenggarakan di Jakarta. Salah satu program TMM adalah Policy Dialogue yaitu pertemuan antara wakil pemerintah dan sektor swasta. Kadin Indonesia diminta menjembatani pertemuan antara para pengusaha Indonesia yang bergerak di beberapa sektor dengan delegasi pengusaha Australia.

Rapat Pokja Hortikultura dan Pameran Pertanian. Kadin, 26 Juni 2006.

Tindak lanjut Program Kerja Pokja Hortikultura Bidang Pangan dan Agribisnis Kadin Indonesia membahas Program kerja Pengembangan Hortikultura Indonesia dan Ekspor/Impor Produk Hortikultura dan masalahnya. Pada hari yang sama dilakukan juga rapat Program Kerja Pokja Pameran Pertanian dan persiapan AGRINEX 2008 dan Rencana kunjungan ke : Inggris (UK Royal Agriculture Show) Juli 2007; Australia (Perth Royal Agriculture Show) September 2007; New Zealand (New Zealand Agriculture Show) September 2007.

GAPMMI & ANGGOTA

Rakor Industri Bakery. Menara Kadin, BNSP - GAPMMI, 17 April 2007.

Pertemuan diawali dengan pengenalan industri bakery dengan BNSP selaku badan dengan tugas menyelenggarakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi. Dalam diskusi terjadi kesepakatan tentang perlunya membuat SKKNI yang baku bagi industri bakery dimana Departemen Perindustrian sebagai Leading sector dan didukung penuh oleh GAPMMI. Rakor juga merekomendasikan pembentukan LSP Bakery.

Raker Butcher, BNSP, 27 Juli 2007.

Pertemuan dengan para Meat Butcher, Industri Pengolahan daging, Ditjen Peternakan, BNSP & GAPMMI. Membahas tentang sertifikasi kompetensi tentang Meat Butcher. Disepakati Pokja untuk membahas LSP & SKKNI.

Seminar Sehari GAPMMI

“ Good Laboratory Practice “
Dalam Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan

Kamis, 6 September 2007
Ruang Bromo, Gedung Pusat Niaga Lt. 6
Jakarta International Expo Kemayoran (PRJ)

Seminar & Pameran

- Nasional -

1 - 4 Agustus 2007. **INDOPLAS - INDOPACK - INDOFOODTEC - INDOPRINT**, Jakarta International Expo Kemayoran. **WAKENI**, Telp: 021-53660804, 021-5325890, Fax: 021-5325887, email: info@wakeni.com

2 Agustus 2007. **Dialog GAPMMI**. Membahas isu-isu terbaru yang berkembang di Industri Makanan & Minuman. Ruang Rinjani, Gedung Pusat Niaga Lantai 6, Jakarta International Expo Kemayoran,

8 - 11 Agustus 2007. **FGD Expo 2007**. Exhibition, Conference, Seminar and Workshop. Jakarta Convention Center Jakarta.

9 Agustus 2007. **Inovative Seminar on Labelling & Packaging Industry**, FGD Expo 2007, Jakarta Convention Center Jakarta.

9 - 12 Agustus 2007. **Pameran Pangan Nusa 2007**. Kartika Expo Center - Balai Kartini Jakarta. PDKM - Depdag. Telp. 021-3190 0527 / 3100 569 ext. 808,803 Fax. 021-3190 7478.

5 - 8 September 2007. **INTERPAK INDONESIA 2007 - INTERFOOD 2007**. Jakarta International Expo Kemayoran. **KRISTA EXHIBITION** Telp. 021-6345861, 6345862, 6334581 Fax. 021-6340140, 6342113. info@kristamedia.com; www.kristamedia.com

- International -

7 - 10 Agustus 2007. **Food & Hotel Malaysia 2007** - The 9th Annually Malaysian International Exhibition of Food, Drinks, Restaurant & Foodservice Equipment, Hotel & Related Technology, Kuala Lumpur, Malaysia, website: www.mesallworld.com, untuk perwakilan di Indonesia: PT. Global Expo Management (CP: Mr. Baki Lee, Event Consultant), Telp: 021-5595 7902, Fax: 021-5595 7903, email: info@gem-indonesia.com

5 - 8 September 2007. **AsiaFood Expo 2007** - The 16th International Exposition on Food Processing Packaging & Handling Machinery, Equipment & Technology, World Trade Centre Metro Manila - Philipina, Telp. (632) 551-7920, Fax. (632) 831-3828, email: time@skynet.net, website: www.tradeinfo.com.ph

5 - 7 September 2007. **Fruit Logistica Asia & Asia Fruit Congress** - Queen Sirikit National Convention Center - Bangkok - Thailand. Email: info@asiafruitlogistica.com; info@asiafruitcongress.com website: www. Asiafruitlogistica.com; www.asiafruitcongress.com

14 - 16 Nopember 2007. **Brau Bevale 2007** - 47th European Trade Fair for the Beverage Industry Raw materials - Technologi - Logistics - Marketing. Nurenberg Germany.

11 - 15 Nopember 2007. **Saudi Food 2007**. the 14th International Food, Equipment and Catering Show, Riyadh Exhibition Centre. BPEN & PT. Global Expo Management Telp. 021 - 5595 7902 Fax. 021 - 5595 7903 Email : euis@gem-indonesua.com; info@gem-indonesia.com

12 - 15 Nopember 2007. **Intrade Malaysia 2007**. MECC, Menara Matrade, Kuala Lumpur. Telp. +630 - 6275 4133 Fax. +630 - 6275 4330. email: enquiry@intrademalaysia.com website: www.intrademalaysia.com

21 - 22 Nopember 2007. **World Food Market 2007**. ExCel - London - Inggris. BPEN Telp. 021 - 31904914 Fax. 021 - 31901627 cc. Hotmida Email : hotmidap@yahoo.com; hotmida@nafed.go.id

Berita Codex

Workshop Pemahaman ISO/IEC 17021 : 2006, Hotel Pitagiri, 2 - 3 Mei 2007.

Workshop diselenggarakan sehubungan dengan dikeluarkannya kebijakan International Accreditation Forum (IAF) dan kebijakan Komite Akreditasi Nasional (KAN) tentang pemberlakuan masa transisi penerapan ISO/IEC 17021 : 2006 “ Conformity Assessment - Requirements”.